

## PUNCAK GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kedua kanan) bersama Anggota Dewan Komisiner OJK Friderica Widyasari Dewi (kedua kiri), Gubernur Sumbar Mahyeldi (kanan) dan Wali Kota Padang Hendri Septa (kiri) memukul gendang saat acara puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Padang, Sumatera Barat, Jumat (16/9). OJK berkomitmen terus mendorong pengembangan UMKM di provinsi itu.



FOTO/ANT

## Wamenkeu Apresiasi Inisiatif CBS BI sebagai E-Banking Pemerintah

Layanan CBS merupakan digitalisasi layanan kepada publik untuk mendukung kelancaran transaksi ekonomi keuangan nasional. Bank Indonesia telah melakukan sinergi dan koordinasi bersama Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan CBS dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam mendukung efisiensi pengelolaan APBN.

**JAKARTA (IM)** – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengapresiasi inisiatif layanan Core Banking System (CBS) Bank Indonesia (BI) untuk mendukung kinerja pengelolaan keuangan negara. “Ini e-banking-nya pemerintah, e-bankingnya Kementerian Keuangan. Terima kasih kita diberikan fasilitas e-banking-nya dari Bank Sentral yang dipakai oleh Pemerintah, dipakai oleh Kementerian Keuangan. Bukan saja untuk

yang Rupiah, tapi juga untuk yang valas. Ini luar biasa,” kata Suahasil dalam acara Central Banking Services Festival (CB-Fest) 2022 di Jakarta, seperti dilansir dari laman Kemenkeu, Jumat (16/9). Layanan CBS merupakan digitalisasi layanan kepada publik untuk mendukung kelancaran transaksi ekonomi keuangan nasional. Bank Indonesia telah melakukan sinergi dan koordinasi bersama Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan CBS dengan

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam mendukung efisiensi pengelolaan APBN. Integrasi tersebut memberikan kemudahan layanan kas pemerintah melalui otomasi pemrosesan transaksi, *real-time settlement process*, dan *paperless*.

“Di dalam Pemerintah, kita mencoba mencari terus supaya SPAN benar-benar bisa mengintegrasikan dari penganggaran sampai dengan pelaksanaan dan implementasi APBN. Kita mendapatkan partner dan *counterpart* dari CBS yang kita *inaugurate* pada hari ini. Terima kasih kepada Bank Indonesia,” ujarnya.

BI juga telah meluncurkan aplikasi *e-licensing* sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan bagi semua mitra kerja. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan National Single Window for Investment (NSWI) yang menjadi portal nasional kegiatan impor dan ekspor barang.

Suahasil menjelaskan sistem *e-licensing* dapat mengakomodasi sistem pelaporan untuk lalu lintas atau berjalannya uang kertas asing yang dipantau oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

“Ini juga luar biasa karena ini adalah layanan bagi seluruh tamu, seluruh WNI, dan juga tamu Indonesia kalau dia membawa uang kertas asing. Kita fasilitasi, namun tetap di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang implementasinya menjadi makin simpel dengan adanya *e-licensing* sebagai layanan Bank Sentral kita,” kata Suahasil.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga seremonial untuk BI sebagai agen penata usaha dan agen pembayaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Valas yang diterbitkan di pasar internasional. Ke depannya, peran BI sebagai agen penata usaha dan agen pembayaran SBSN valas akan semakin memperkuat

koordinasi antara fiskal dan moneter, terutama dalam penataan SBSN, baik yang diterbitkan di pasar domestik maupun pasar internasional.

“Ini akan menjadi *milestone* baru karena Indonesia adalah issuer dari SBSN sovereign yang paling besar sedunia. Dan tentu ini adalah bentuk komitmen kita sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kita ada di garda terdepan dalam konteks obligasi syariah internasional dan juga yang berbentuk valas. Dengan bantuan Bank Indonesia, layanan yang baru sebagai penata usaha dan agen pembayar, saya berharap ini akan memberikan *confidence* lebih besar kepada seluruh investor kita bahwa penatausahaan kita dilakukan dengan cara yang makin hari makin proper,” ujar Suahasil. • dro

## BCA Bukukan Penjualan SR017 Mencapai Rp5,4 Triliun

**JAKARTA (IM)** - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan penjualan produk Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SR017 mencapai Rp5,4 triliun sepanjang masa penawaran sejak 19 Agustus 2022 hingga 14 September 2022.

Direktur BCA Haryanto Budiman mengatakan pencapaian tersebut merupakan rekor penjualan SBN Ritel BCA di pasar perdana, yang salah satunya ditopang oleh acara Wealth Summit BCA 2022.

Kegiatan itu menghadirkan berbagai pakar di bidang wealth serta terdapat penawaran eksklusif terkait promo kredit modal kerja dengan bunga spesial mulai dari 5,99 persen per tahun dengan obligasi pemerintah, seperti seri ORI/SR/FR sebagai agunan.

“Pencapaian ini kami harapkan dapat berkontribusi positif bagi pemerintah dalam mendorong pembiayaan pembangunan nasional. Kami juga bersyukur karena investor dan masyarakat luas dapat memanfaatkan SR017 untuk meningkatkan portofolio investasi melalui SBN ritel pemerintah, sekaligus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pinjaman produktif sesuai kebutuhan,” ucap Haryanto dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan penjualan sebesar Rp5,4 triliun tersebut dikontribusikan lebih dari 14 ribu investor. Mayoritas investor yang menyerap portofolio tersebut adalah generasi X sebesar 38 persen dari total investor, disusul oleh generasi Y atau milenial sebesar 31 persen dari total investor.

Penjualan SR017 dilakukan melalui KlikBCA Individu dan platform WELMA BCA, yaitu aplikasi yang menyediakan beragam produk investasi dan proteksi bagi nasabah.

Melalui WELMA, nasabah

dapat bertransaksi secara daring atau *online* untuk membuat nomor identitas investasi (SID) *online* dan membeli, antara lain obligasi perdana dan sekunder mulai dari Rp1 juta, reksadana IDR mulai dari Rp100 ribu, serta reksa dana USD mulai dari 10.000 dolar AS.

Kontribusi WELMA turut mendorong pertumbuhan dana kelolaan BCA. Jumlah penduduk aplikasi itu mencapai lebih dari 475 ribu pengguna, dengan nominal transaksi lebih dari Rp50 triliun sejak diluncurkan akhir tahun 2019 hingga Agustus 2022 dan lebih dari 65 persen pemesanan SR017 dilakukan nasabah BCA via WELMA.

Hingga semester I-2022, kinerja dana kelolaan BCA tumbuh positif, terlihat dari pertumbuhan *asset under management* (AUM) produk reksadana dan obligasi yang mencapai 54 persen secara tahunan.

Haryanto menambahkan, masa penawaran SBR Ritel seri SR017 memang sudah selesai. Namun, masyarakat bisa memanfaatkan BCA Wealth Summit 2022 untuk mengenali dan mengambil keputusan yang tepat untuk memiliki portofolio investasi dan proteksi sesuai kebutuhan.

Ada beragam penawaran menarik untuk menambahkan diversifikasi portofolio investasi dan proteksi dari acara ini dan sejumlah keuntungan lain, seperti kesempatan untuk bertemu dengan para pakar investasi dan proteksi melalui sejumlah konferensi, konsultasi, serta hiburan.

“Saya mengajak segenap masyarakat untuk datang ke BCA Wealth Summit 2022 yang masih berlangsung secara daring hingga 23 September mendatang. Masyarakat dapat mengakses laman resmi [wealthsummit.bca.co.id](http://wealthsummit.bca.co.id) untuk dapat menghadiri acara tersebut,” tutup Haryanto. • pan

## Pertemuan Kelompok Kerja TIIWG dan TIIMM G20 Siap Digelar

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perindustrian siap menggelar Pertemuan Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi dan Industri atau Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG) G20.

Puncaknya dilakukan Pertemuan Tingkat Menteri G20 atau Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) sebagai bagian dari agenda kegiatan Presidensi G20 Indonesia, yang akan diselenggarakan pada 19-23 September 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali.

“Dengan persiapan dan koordinasi yang matang baik di tingkat internal maupun dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, Kementerian Perdagangan siap menggelar pertemuan TIIWG dan TIIMM selama satu minggu penuh di Bali,” kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional sekaligus Ketua

Persidangan TIIWG Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono di Jakarta, Jumat (16/9).

Ia menyatakan pertemuan ini mendapat dukungan penuh Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, hingga pemerintah provinsi, dan berbagai pihak terkait di Bali.

“Kami terus melakukan koordinasi secara intensif agar pertemuan dapat terlaksana dengan maksimal dari segi substansi dan penyelenggaraan, serta memastikan kelancaran kehadiran seluruh delegasi G20,” kata Djatmiko.

Djatmiko menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme dari para negara anggota, negara undangan, dan organisasi internasional. “Kehadiran para menteri anggota G20 secara langsung di Bali sangat tinggi. Sebanyak 34 menteri dan pejabat setingkat menteri, serta pimpinan organisasi internasional, berikut dengan lebih dari 200 delegasi sudah

terkonfirmasi hadir secara langsung di Bali,” ujarnya.

Sebagai bagian dari Pertemuan Kelompok Kerja dan Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan, Investasi, dan Industri; Kementerian Perdagangan juga akan menggelar “G20 Sustainable Expo” dengan tema “Sustainable Together, Sustainable Stronger” yang memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pameran tersebut diisi beragam produk-produk inovasi dari berbagai sektor perdagangan, investasi dan industri. “Pada rangkaian pertemuan ini, kami berupaya menyukseskan aspek substansi, memberikan delegasi G20 pengalaman keramah-tamahan Indonesia, serta memperkenalkan kuliner dan keunggulan pariwisata Bali sebagai bentuk promosi kekayaan budaya Nusantara,” ujarnya. • dro



IDN/ANT

## PAMERAN UMKM DAN OTOMOTIF

Petugas mengecek mobil listrik saat pameran UMKM dan otomotif di Bank Central Asia (BCA) Tegal, Jawa Tengah, Jumat (16/9). Pameran tersebut selain untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM juga untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan mobil listrik.



**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## DJP Optimalkan Pungutan Pajak Pusat dan Daerah

**JAKARTA (IM)** - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah tahap IV melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tripartit dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan 86 pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (16/9) mengungkapkan ini adalah saatnya untuk bergerak ke depan bersama-sama.

“Sinergi untuk peningkatan apa yang sangat kita perlukan, yaitu pembangunan nasional, karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu untuk pembangunan nasional,” kata Suryo, dilansir dari Antara.

Penandatanganan PKS yang dilakukan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (15/9) dan secara daring itu bertujuan untuk mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, data perizinan, dan penyediaan data informasi keuangan daerah, mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama, serta pemanfaatan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan.

DJP, DJPK dan pemda juga bersepakat untuk melakukan pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan demi meningkatkan kapabilitas aparatur.

Melalui kerja sama dengan pemda, Suryo berharap dapat menerima sumber data penting untuk pengawasan kepatuhan pajak antara lain data kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan, dan usaha perkebunan. Sebaliknya, pemda juga akan menerima data perpajakan dari DJP untuk kepentingan pengawasan

daerah. Sesuai namanya yaitu tahap IV, penandatanganan kerja sama ini bukan kali pertama dilakukan. Perjanjian sebelumnya telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tahap I pada 2019 piloting di tujuh kota di tujuh provinsi, tahap II pada 2020 dengan 78 pemda, dan tahap III pada 2021 dengan 83 pemda.

Namun di tahap III, sebenarnya terdapat 84 pemda yang mengikuti seremoni tahap III tetapi satu pemda gagal mengumpulkan berkas PKS, sehingga total sampai saat ini ada 254 pemda yang telah bersinergi. Beberapa capaian dari kerja sama selama ini yakni telah dilakukan pengawasan bersama dengan penerbitan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) sebanyak 6.745 wajib pajak dengan 152 pemda.

Klasifikasi lapangan usaha atas DSPB paling banyak berada pada sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman dengan persentase 54 persen, kegiatan jasa lainnya 19 persen, perdagangan besar dan eceran 14 persen, real estat dan konstruksi empat persen, kebudayaan, hiburan, dan rekreasi tiga persen, serta lain-lainnya enam persen.

Sebagai tindak lanjut pengawasan oleh pemda, telah diberikan persetujuan izin pembukaan data perpajakan oleh Menteri Keuangan terhadap wajib pajak dalam DSPB tersebut. Selain itu, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan kepada 18 pemda, kegiatan penulihan bersama, serta Diklat Penagihan terkait Juru Sita bagi aparatur dari 21 pemda yang diselenggarakan oleh DJPK.

DJP berharap kolaborasi ini dapat segera diikuti seluruh pemda untuk mengatasi tantangan pemungutan pajak pusat dan daerah, di antaranya potensi korupsi, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan padanan data. • dot

## Penyaluran Kredit Perbankan Tumbuh Positif di Agustus

**JAKARTA (IM)** - Bank Indonesia (BI) mencatat permintaan pembiayaan baru korporasi pada Agustus 2022 terindikasi tumbuh positif.

Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 17,9%.

“Kebutuhan pembiayaan terutama dipenuhi dari dana sendiri yang masih menjadi mayoritas sumber pembiayaan, diikuti oleh pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (16/9).

Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman ke perbankan dalam negeri terindikasi meningkat. “Penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Agustus 2022 juga terindikasi tumbuh lebih tinggi dari bulan sebelumnya, sejalan dengan indikasi meningkatnya permintaan pembiayaan dari korporasi ke perbankan dalam negeri,” ungkap Erwin.

Berdasarkan survei, faktor utama yang memengaruhi perkiraan penyaluran kredit baru tersebut yaitu permintaan pembiayaan dari nasabah serta prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan. Sementara itu, untuk keseluruhan periode triwulan III 2022, penawaran penyaluran kredit baru juga diprakirakan tumbuh positif meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru terindikasi relatif stabil pada Agustus 2022.

Mayoritas rumah tangga memilih bank umum sebagai sumber utama penambahan pembiayaan dengan jenis pembiayaan yang diajukan mayoritas berupa Kredit Multi Guna. “Adapun sumber pembiayaan lainnya yang menjadi preferensi responden untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan adalah antara lain koperasi dan leasing,” ujarnya. • hen